

IMPLEMENTASI HAK REMISI NARAPIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS II A KABUPATEN JAYAPURA

Arman Tahir Wear

Fakultas Hukum, Universitas Yapis Papua

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Implementasi Hak Remisi Narapidana Narkotika Di Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Kabupaten Jayapura” Studi Kasus Lapas Kelas II A Jayapura), Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jayapura, Khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Jayapura, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang pemenuhan hak narapidana narkotika terkait pemberian remisi menurut peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini dipergunakan untuk mengetahui tentang faktor-faktor yang menghambat dalam pemberian remisi bagi narapidana narkotika di Lapas Kelas II A Kabupaten Jayapura.

untuk mengkaji dan mengetahui bagaimana proses pelaksanaan pemberian remisi pada narapina narkotika di Lapas Kabupaten Jayapura, maka peneliti menggunakan tipe penelitian Hukum Normatif, Hukum Empiris, dengan dasar penelitian studi wawancara, dengan mengambil instansi dan penetapan di Lapas Kelas II A Kabupaten Jayapura. Untuk memperoleh data maka penelitian ini menggunakan 2 (dua) metode pengumpulan data yaitu dengan melakukan wawancara dengan informan, dan Studi Kepustakaan yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari berbagai kepustakaan, dan dokumen lain yang relevan dengan obyek penelitian.

Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian remisi kepada narapidana dan anak pidana pada Lapas Kelas II A Narkota Kabupaten Jayapura suda sesuai PP Nomor 99 Tahun 2012perundang-undangan, dan masi ada faktor yang menghambat pemberian remisi tersebut ialah faktor Internal dan Eksternal.

Kata Kunci : Remisi, Hambatan remisi.

DAFTAR PUSTAKA

- Daniel Bony, Sujono, 2013, Komentor & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Jakarta: Sinar Grafika.
- Dimiyati, Khudzaifah, 2004, Metodologi Penelitian Hukum, Surakarta: UMS Press.
- Kansil, C.S.T, 2008, Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : Balai Pustaka.
- Rianto, Adi, 2010, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta: Granit.
- Soekanto, Soejono dan Mamudji Sri, 2012, Penelitianf Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudaryono dan Surbakti Natangsa, 2005, Hukum Pidana 1, Surakarta: UMS Press.
- Taneko, Soleman B., 1993, Pokok-pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suryanto, wawancara pribadi, Lapas Kelas II A Kabupaten Jayapura. Jayapura, 09 Desember 2021. Pukul : 12:04 – 13:09.

Peraturan/perundangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi
Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1955 tentang Ampunan Istimewa
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;

Website

<http://id.wikipedia.org/wiki/Rutan>

[http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga Pemasarakatan](http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasarakatan)[http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4b22ef6f96658/perbedaan danpersamaan rutan dan lapas](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4b22ef6f96658/perbedaan_danpersamaan_rutan_dan_lapas)[http://www.tempo.co/read/news/2016/04/26/063450430/Pemerintah tebtkan PP Remisi yang baru](http://www.tempo.co/read/news/2016/04/26/063450430/Pemerintah_tebtkan_PP_Remisi_yang_baru)